

Konflik pada Kaderisasi Kepemimpinan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus

Nanda Wisnu Syahputra¹, Haryono², Subhan Widiandiyah³

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

E-mail: 2290210052@untirta.ac.id¹, haryono@untirta.ac.id², subhanwidiandiyah@untirta.ac.id³

Article History:

Received: 11 Januari 2026

Revised: 11 Februari 2026

Accepted: 13 Februari 2026

Keywords: *Konflik, Spiral Kekerasan, Organisasi Mahasiswa Intra Kampus*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika konflik serta manifestasi spiral kekerasan yang muncul dalam proses kaderisasi kepemimpinan pada kegiatan Latihan Kepemimpinan 1 (LK 1) Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi (HIMADIKSIO), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan LK 1 HIMADIKSIO masih berada dalam pola spiral kekerasan sebagaimana dikemukakan oleh Dom Helder Camara, yang terdiri atas ketidakadilan, pemberontakan, dan represi. Komisi disiplin sebagai pihak yang memiliki otoritas utama memperlihatkan bentuk kekerasan verbal, psikis, dan fisik yang secara sistematis direproduksi dalam sistem kaderisasi. Situasi tersebut menciptakan ketimpangan relasi kuasa antara komisi disiplin dan peserta, menimbulkan dampak psikologis berupa trauma, serta memunculkan siklus balas dendam yang memperpanjang keberlanjutan praktik kekerasan pada periode kaderisasi berikutnya.*

PENDAHULUAN

Organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai wadah pengembangan diri yang memberikan berbagai manfaat, antara lain memperluas wawasan, mengasah kemampuan berpikir kritis, serta membentuk karakter dan integritas mahasiswa (Oviyanti, 2016). Organisasi kemahasiswaan terbagi dalam beberapa jenjang, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) di tingkat jurusan atau program studi, Senat Mahasiswa (SEMA) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) di tingkat fakultas, serta SEMA, DEMAS, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM/UKK) di tingkat universitas. Organisasi kemahasiswaan intra kampus memiliki legalitas yang diakui oleh perguruan tinggi dan berada di bawah koordinasi serta pembinaan pihak birokrasi kampus, seperti Wakil Rektor III di tingkat universitas dan Wakil Dekan III di tingkat fakultas (Tuala & Fradito, 2021).

Salah satu bentuk komitmen organisasi kemahasiswaan dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas adalah melalui pelaksanaan program kerja kaderisasi. Kaderisasi organisasi kampus merupakan sebuah skema untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi pemimpin di masa depan, dan mengemban tanggung jawab untuk kehidupan masyarakat terutama pada masyarakat kampus (Rivai, 2006).

Kaderisasi yang diselenggarakan secara sistematis merupakan bentuk upaya organisasi untuk menjamin keberlanjutan kepengurusan serta menghasilkan proses regenerasi yang berkualitas. Pelaksanaan kaderisasi juga mencerminkan komitmen organisasi dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, menegakkan nilai-nilai demokrasi, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di lingkungan perguruan tinggi. Namun demikian, proses kaderisasi dalam organisasi kemahasiswaan kerap berpotensi menimbulkan konflik, baik antara sesama anggota maupun antara panitia dengan peserta.

Pelaksanaan kegiatan Latihan Kepemimpinan I (LK I) oleh HIMADIKSIO kerap diwarnai dengan munculnya dinamika konflik. Konflik ini berakar pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang, di mana peserta LK I ditempatkan dalam posisi sebagai objek yang harus tunduk pada otoritas panitia. Berdasarkan struktur kegiatan LK I HIMADIKSIO, Komisi Disiplin memegang kewenangan penuh dalam menetapkan serta menegakkan aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut, peserta akan dikenakan sanksi atau konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dahrendorf memandang kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengendalikan dan memberlakukan sanksi, yang memungkinkan pihak yang berkuasa untuk memberikan perintah serta memperoleh kepatuhan dari pihak yang tidak memiliki kekuasaan. Dalam pandangannya, konflik kepentingan merupakan konsekuensi yang tak terelakkan dari adanya perbedaan posisi antara mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa (Susan, 2009).

Kelompok yang berada dalam struktur dengan berbagai perangkat wewenang mampu mengarahkan berbagai bentuk kebijakan pada orang lain di luar struktur wewenang tersebut, kondisi ini merupakan bentuk dominasi (Susan, 2009). Dalam sosiologi konflik, pusat dalam perhatian konflik terletak pada kekuasaan sebagai hubungan sosial. Konflik bisa muncul dalam bentuk kekerasan. Kekerasan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai bentuk tindakan yang melukai, membunuh, merusak, dan menghancurkan lingkungan (Susan, 2009).

Menurut pandangan Dom Helder Camara, kekerasan merupakan suatu realitas yang bersifat multidimensi dan saling terkait antara satu bentuk kekerasan dengan bentuk kekerasan lainnya. Pandangan ini menunjukkan bahwa konflik kekerasan sulit untuk diselesaikan secara tuntas, karena cenderung membentuk suatu pola spiral yang berulang dan terus berlanjut, dimulai dari ketidakadilan sosial, dilanjutkan dengan tindakan perlawanan atau pemberontakan, dan direspons melalui tindakan represif oleh pihak yang memiliki kekuasaan (Camara, 2000).

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis konflik yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Latihan Kepemimpinan I (LK I) HIMADIKSIO melalui perspektif teori spiral kekerasan yang dikemukakan oleh Dom Helder Camara.

LANDASAN TEORI

Teori Spiral Kekerasan Dom Helder Camara

Camara mengkaji secara khusus bagaimana tiga bentuk kekerasan yaitu ketidakadilan, pemberontakan, dan represi. Ketiganya membentuk suatu mata rantai, di mana kemunculan salah satu bentuk kekerasan dapat memicu dan melanggengkan bentuk kekerasan lainnya. Dengan teori

spiral kekerasan ini tampak bahwa Dom Helder Camara adalah seorang strukturalis yang menyadarkan sepenuhnya bahwa kekerasan merupakan realitas multidimensi, tidak bisa dipisahkan keterkaitannya antara kekerasan yang satu dengan kekerasan lainnya (Camara, 2009).

Camara memandang kekerasan tingkat pertama sebagai suatu fenomena yang dapat menimpa individu, kelompok, maupun negara, yang muncul akibat beroperasinya ketidakadilan sosial serta ketimpangan ekonomi dalam skala internasional. Ketidakadilan tersebut timbul karena adanya upaya dari kelompok elit untuk mempertahankan kepentingan mereka, sehingga tercipta dan terpelihara struktur sosial yang mendorong munculnya kondisi “sub-human”, yaitu situasi kehidupan di bawah standar kelayakan untuk hidup secara manusiawi (Camara, 2009). Kondisi tersebut menimbulkan berbagai bentuk kerusakan, baik fisik, psikologis, maupun moral. Individu yang berada dalam situasi “perbudakan”. suatu kondisi yang tidak tampak secara kasat mata namun nyata adanya hidup dalam ketidakpastian terhadap masa depan dan kehilangan harapan, sehingga terjerumus pada sikap pasrah (fatalisme) dan mengalami kemerosotan menuju mentalitas ketergantungan atau “mental pengemis.” (Camara, 2009).

Kekerasan memancing kekerasan. Tanpa rasa takut dan tanpa henti-hentinya. Ketidakadilan menimbulkan pemberontakan, baik dari kaum yang tertindas maupun dari kaum muda, yang bertekad untuk memenangkan dunia yang lebih adil dan lebih manusiawi (Camara, 2009).

Ketika konflik, protes, dan pemberontakan itu muncul, ketika kekerasan nomor 2 mencoba melawan kekerasan nomor 1, penguasa memandang dirinya berkewajiban memelihara ketertiban, meski harus dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Disinilah muncul kekerasan nomor 3 yaitu represi penguasa. Dengan kata lain, kekerasan nomor 3 ini adalah penggunaan kekuatan dan cara-cara kekerasan oleh lembaga untuk menekan pemberontakan (Camara, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti serta memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih rinci dari informan yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria penelitian. Sementara itu, studi dokumentasi dimanfaatkan sebagai sumber data pendukung untuk memperkuat temuan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dengan fokus penelitian. Adapun subjek penelitian meliputi Komisi Disiplin, peserta, serta Ketua Pelaksana Latihan Kepemimpinan I (LK I) HIMADIKSIO. Penelitian ini dilaksanakan pada kegiatan Latihan Kepemimpinan I HIMADIKSIO periode 2021–2024. Adapun teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman (2014), yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Spiral Kekerasan pada Kaderisasi Kepemimpinan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus Latihan Kepemimpinan 1 HIMADIKSIO

Konflik spiral kekerasan dapat dijelaskan melalui tiga bentuk utama, yaitu ketidakadilan, pemberontakan, serta represi penguasa. Ketiga bentuk kekerasan tersebut memiliki keterkaitan yang erat, di mana kemunculan satu bentuk kekerasan berpotensi memicu dan melahirkan bentuk kekerasan lainnya. Menurut Camara (2000), kekerasan merupakan realitas multidimensi yang tidak

dapat dipisahkan, karena setiap bentuk kekerasan saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain.

Kekerasan Nomor 1 (Ketidakadilan)

Dalam pelaksanaan Latihan Kepemimpinan I (LK I) HIMADIKSIO, fenomena spiral kekerasan dapat dipahami sebagai bentuk ketegangan yang timbul akibat adanya ketimpangan relasi kuasa antara Komisi Disiplin dan peserta. Komisi Disiplin menempati posisi dominan karena memiliki otoritas dalam menjaga ketertiban, mengendalikan jalannya kegiatan, serta menetapkan aturan dan sanksi. Kondisi ini menempatkan Komisi Disiplin sebagai pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan dan pengambilan keputusan, sedangkan peserta berada pada posisi subordinatif yang cenderung pasif dan terkontrol dalam struktur kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut.

“Peran komisi disiplin menjadi pusat perhatian dibandingkan seksi-seksi lainnya.

Komisi disiplin memiliki wewenang yang sangat kuat, yakni otoritas penuh untuk mengarahkan peserta maupun panitia dalam pelaksanaan LK 1. Dengan demikian, seluruh aturan selama kegiatan LK 1 sepenuhnya berada di bawah kendali komisi disiplin.”.

(Wawancara dengan Martogi Sitohang, Komisi Disiplin LK 1 HIMADIKSIO Periode 2022).

Hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa komisi disiplin memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan seksi kepanitiaan lainnya dalam penyelenggaraan Latihan Kepemimpinan I (LK I) HIMADIKSIO. Komisi disiplin ini diposisikan sebagai pusat pengendali karena memiliki otoritas yang kuat dalam memberikan arahan baik kepada peserta maupun panitia selama kegiatan berlangsung. Kedudukan tersebut menempatkan komisi disiplin sebagai pihak utama dalam penerapan aturan dan tata tertib LK 1, sehingga keberadaannya dipahami sebagai unsur sentral yang menentukan keberlangsungan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Komisi Disiplin sebagai Kelompok *Previledged* (Kelompok Istimewa)

Camara (2000) ketidakadilan adalah sebuah kekerasan mendasar (basic), kekerasan nomor I (Violence no I). Kekerasan nomor I merupakan gejala yang menimpa baik perseorangan maupun kelompok atau bahkan negara yang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadilan sosial dan ketimpangan sosial. Kekerasan nomor I merujuk pada adanya sistem sosial yang tidak adil, di mana satu pihak mendominasi pihak lain melalui aturan, struktur, atau mekanisme yang memarginalkan kelompok tertentu. Dalam konteks Latihan Kepemimpinan I (LK I) HIMADIKSIO, ketidakadilan tampak jelas melalui dominasi komisi disiplin yang dilegitimasi melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan telah menjadi budaya kaderisasi. Ketentuan pasal yang menyatakan “Komisi Disiplin Tidak Pernah Salah” dan “Jika Komisi Disiplin Salah Maka Kembali ke Pasal I”. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut.

“.....sebelum masuk kedalam aturan, terdapat pasal yang berbunyi “pasal 1 komisi disiplin tidak pernah salah, pasal 2 jika komisi disiplin salah maka kembali ke pasal 1”, nah pasal itu aja udah gak layak untuk peserta, artinya kalau komisi disiplin membuat kesalahan itu engga akan jadi permasalahan, sedangkan kalau peserta membuat kesalahan itu habis-habisan di sanksi”. (Wawancara dengan Muhammad Ridan Abdillah, Koordinator Komisi Disiplin LK 1 HIMADIKSIO Periode 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa aturan dalam LK 1 HIMADIKSIO menunjukkan ketidakadilan karena memberikan hak istimewa bagi komisi disiplin. Aturan yang menyatakan bahwa komisi disiplin tidak pernah salah memperkuat dominasi mereka, sehingga kesalahan panitia dianggap tidak bermasalah, sementara kesalahan peserta selalu berujung pada sanksi yang tegas. Hal ini menegaskan adanya ketimpangan relasi kuasa antara komisi disiplin dan peserta.

2. Peserta LK 1 HIMADIKSIO Terjebak dalam Kondisi *Sub Human*

Ketidakadilan itu terjadi sebagai akibat dari upaya kelompok elit (*Previledged*) mempertahankan kepentingan mereka sehingga terpelihara sebuah struktur yang mendorong terbentuknya kondisi “*sub human*” yaitu kondisi hidup dibawah standar layak untuk hidup sebagai manusia normal (Camara, 2000). Seperti yang disampaikan oleh informan berikut.

“Yang aku rasa mulai dari sosialisasi aturan itu udah deg deg an, kan di satuin di dalem ruangan, itu cuma ada peserta sama komdisnya, nah komdisnya ini dari awal udah marah marah mulu untuk memberitahu, kita ya gimana gak geter yakk, nah kondisi psikologis yang aku rasakan sih degdeg an, takut, untuk ngomong sepatah kata pun takut karena takut dimarahin”. (Wawancara dengan Khansa Nur A, Peserta LK 1 HIMADIKSIO Periode 2023).

Berdasarkan wawancara di atas, menunjukkan bahwa peserta LK 1 HIMADIKSIO mengalami tekanan psikologis sejak tahap sosialisasi aturan. Kehadiran peserta dalam ruang yang hanya berisi komisi disiplin dan sikap marahmarah panitia menimbulkan perasaan cemas, takut, dan terbatasnya keberanian untuk menyampaikan pendapat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak awal, peserta diposisikan dalam posisi subordinatif yang memperkuat dominasi komisi disiplin dan membatasi ruang partisipasi mereka.

Hak istimewa (*previledged*) yang dimiliki komisi disiplin membuat peserta berada dalam posisi *sub human*, yakni diperlakukan bukan sebagai individu yang setara, melainkan sebagai pihak yang harus tunduk secara pasif terhadap aturan. Penampilan intimidatif komisi disiplin, ditambah dengan sistem pengawasan ketat, semakin mempersempit ruang ekspresi peserta, menciptakan tekanan psikologis, dan mempertegas adanya relasi kuasa yang timpang.

Kekerasan Nomor 2 (Pemberontakan)

1. Munculnya Protes, Perlawanan, dan Pemberontakan dalam LK 1 HIMADIKSIO

Kekerasan nomor II muncul sebagai bentuk perlawanan, protes, dan pemberontakan dari kelompok yang berada dalam kondisi tertindas atau *subhuman*, yang merasa terdominasi oleh sistem yang tidak adil. Dalam konteks Latihan Kepemimpinan I (LK I) HIMADIKSIO, bentuk perlawanan peserta terlihat dari tindakan protes, pembangkangan terhadap aturan, serta demonstrasi yang dilakukan secara kolektif dan terorganisir. Pemberontakan tersebut dirancang sebagai bagian dari materi manajemen aksi yang bersifat simulatif. Namun, dalam praktiknya, demonstrasi justru mengalami pergeseran makna menjadi sarana nyata untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap sistem kaderisasi.

Dalam proses kaderisasi Latihan Kepemimpinan I (LK I) HIMADIKSIO, peserta yang menyadari dirinya berada dalam kondisi *sub human* mulai menunjukkan kesadaran atas posisi yang dialami. Kesadaran tersebut kemudian memunculkan bentuk perlawanan dan penolakan bahkan pemberontakan terhadap mekanisme kaderisasi yang diterapkan. Indikasi perlawanan terlihat dari reaksi peserta terhadap sistem poin, aturan, dan sanksi yang dinilai merugikan, sehingga mereka berupaya menolak keberlakuan sistem tersebut. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut.

“.....reaksi dari gua dan temen temen gua tuh melakukan perlawanan dengan kayak menego aturan aturan yang ada dan juga meringankan aturan aturan dan sanksi yang ada.....”. (Wawancara dengan Haekal Habibi, Peserta LK 1 HIMADIKSIO Periode 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa peserta LK 1 HIMADIKSIO periode 2022 tidak sepenuhnya menerima aturan dan sanksi yang diberlakukan. Sebagai bentuk perlawanan, mereka berusaha menegosiasikan aturan tersebut agar dapat diringankan, sehingga mekanisme yang diterapkan tidak sepenuhnya membebani peserta.

Pemberontakan tersebut dirancang sebagai bagian dari materi manajemen aksi yang bersifat simulatif. Namun, dalam praktiknya, demonstrasi justru mengalami pergeseran makna menjadi sarana nyata untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap sistem kaderisasi. Hal ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya bereaksi secara spontan, melainkan mengembangkan kesadaran kolektif untuk menuntut keadilan dan sistem kaderisasi yang lebih manusiawi. Komisi disiplin, yang dianggap memegang otoritas penuh dan bertindak sewenang-wenang melalui hak istimewanya, komisi disiplin menjadi pihak utama yang dituju dalam aksi perlawanan ini.

“...pada saat pelaksanaan materi manajemen aksi, jadi disana itu kita benar benar berontak, kita kan di manajemen aksi tuh sebenarnya ada framing dulu kalo kita nih mau ngebawa isu apa nih di manajemen aksi, nah waktu itu kita ngebawa terkait UKT yang terlalu tinggi yang ditetapkan oleh rektor dan segala macamnya, dan disana kegiatan manajemen aksinya engga terlalu terkontrol gitu loh, jadi malah ngeberontak ke panitia kayak “panitia juga ngelakuin kesalahan kayak gini loh dan segala macamnya” nah disana sih momen nya kita memanfaatkan untuk melakukan balas dendam”. (Wawancara dengan Bilkis Shifa Husaeni, Peserta LK 1 HIMADIKSIO Periode 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa sesi materi manajemen aksi dalam kegiatan LK 1 HIMADIKSIO menjadi momentum bagi peserta untuk mengekspresikan bentuk perlawanan terhadap panitia. Pada tahap ini, alih-alih berfokus pada isu yang telah ditentukan, peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengkritisi sekaligus mengungkap kesalahan yang dilakukan panitia. Kondisi ini menunjukkan bahwa materi manajemen aksi berfungsi sebagai ruang alternatif bagi peserta untuk melakukan perlawanan yang lebih terbuka, sekaligus sebagai bentuk akumulasi kekecewaan atas tekanan yang dialami selama proses kaderisasi.

Kondisi *sub human* ini selanjutnya menciptakan ketegangan terus menerus di masyarakat, mendorong munculnya kekerasan nomor II, yaitu pemberontakan dari kalangan masyarakat sipil. Kekerasan yang dimapankan ini, yakni kekerasan nomor I, memancing kekerasan nomor II berupa pemberontakan yang datang dari kelompok tertindas, dengan kuat diarahkan untuk memenangkan dunia yang lebih adil dan manusiawi (Camara, 2000:32).

Protes yang dilakukan peserta tidak hanya muncul pada tahap awal sosialisasi aturan, ketika mereka meminta keringanan terhadap aturan dan sanksi, tetapi juga terlihat pada akhir kegiatan. Pada fase tersebut, peserta menuntut adanya keadilan agar seluruh peserta dapat dinyatakan lulus setelah melalui rangkaian proses kaderisasi. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut.

“disaat akhir acara juga tuh kak, jadi kan kita make sistem poin ya, kalau poin nya di bawah batas aman itu peserta engga lulus, nah di akhir ada beberapa temen aku yang engga lulus, kita ngebela bareng bareng satu angkatan ke temen kita yang engga lulus, soalnya masa kita udah ngikutin rangkaiannya selama 3 hari engga lulus, agak chaos juga sih itu kak di acara terakhir, akhirnya kita diskusi dan ketua umum ngasih opsi supaya 57 semuanya lulus itu ada tugas tambahan yang harus kita lakuin kak”. (Wawancara dengan Andis Saputra, Peserta LK 1 HIMADIKSIO Periode 2024).

Hasil wawancara dengan Andis menunjukkan bahwa pada tahap akhir kegiatan muncul solidaritas kolektif antar peserta terhadap rekan mereka yang tidak dinyatakan lulus akibat penerapan sistem poin. Peserta menilai kondisi tersebut tidak adil mengingat seluruh rangkaian kegiatan telah diikuti, sehingga mereka melakukan pembelaan bersama. Situasi ini sempat menimbulkan ketegangan, namun kemudian diselesaikan melalui kompromi, yakni dengan pemberian tugas tambahan oleh ketua umum sebagai syarat agar seluruh peserta dapat dinyatakan lulus.

Kekerasan memancing kekerasan. Tanpa rasa takut dan tanpa henti-hentinya ketidakadilan menimbulkan pemberontakan, baik dari kaum tertindas maupun dari kaum muda, yang bertekad untuk memenangkan dunia yang lebih adil dan lebih manusiawi (Camara, 2000).

Kekerasan Nomor 3 (Represi)

1. Kemudian Datanglah Represi dari Komisi Disiplin

Ketika bentuk perlawanan, protes, dan pemberontakan muncul dalam kegiatan kaderisasi Latihan Kepemimpinan 1 HIMADIKSIO, komisi disiplin memiliki kewajiban untuk memberikan respons terhadap tindakan tersebut. Upaya yang dilakukan komisi disiplin cenderung bersifat represif dengan tujuan mengendalikan dinamika perlawanan yang terjadi. Dalam Latihan Kepemimpinan I (LK I) HIMADIKSIO, tindakan represif tampak jelas melalui langkah komisi disiplin dalam menghadapi pemberontakan peserta (kekerasan nomor II). Komisi disiplin menggunakan berbagai strategi penertiban seperti metode blackroom, pengurangan poin kelulusan, hingga penerapan kekerasan verbal dan psikis yang menimbulkan tekanan psikologis berkepanjangan. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut.

“Karena komisi disiplin balik lagi adalah bagian dari panitia, jadi ada tindakan represif dari kita juga sebenarnya, ibaratnya kalau kita sepakati apa yang diminta oleh peserta tujuan LK1 ini bisa bisa enggak tercapai, dan kita agak otiriter untuk menolak dan membungkam argumen argumen para peserta”. (Wawancara dengan Ardian Baldan K, Koordinator Komisi Disiplin LK 1 HIMADIKSIO Periode 2024).

Hasil wawancara dengan Ardian, dapat dipahami bahwa komisi disiplin sebagai bagian dari panitia memiliki posisi penting dalam mengendalikan dinamika kegiatan LK 1 HIMADIKSIO. Ketika muncul bentuk perlawanan atau protes dari peserta, komisi disiplin merespons dengan tindakan represif yang bersifat otoriter. Dengan cara membatasi ruang kritik bagi peserta, bahkan mengarah pada upaya pembungkaman argument.

“...kalo ada peserta yang melakukan banyak kesalahan biasanya masuk ke blackroom atau sidang kecil, jadi kayak lebih personal ditanya2 sama komdis, kayak kenapa dia melakukan kesalahan tersebut berulang kali gitu”. (Wawancara dengan Delilla Permata Sari, Ketua Pelaksana LK 1 HIMADIKSIO Periode 2023).

Hasil wawancara dengan Delilla menunjukkan bahwa blackroom berfungsi sebagai mekanisme represif untuk menangani peserta yang dianggap sering melanggar aturan. Dalam ruang ini, peserta diinterogasi secara personal oleh komisi disiplin guna mempertanyakan alasan terjadinya pelanggaran berulang.

Ketika konflik sampai ke jalan-jalan, ketika kekerasan nomor II mencoba melawan kekerasan nomor I, para penguasa memandang dirinya wajib menjaga atau memulihkan ketertiban umum, sekalipun itu berarti dipakainya kekuatan; inilah kekerasan nomor III. Seringkali penguasa bertindak lebih jauh lagi, dan hal ini menjadi semakin umum, logika kekerasan menyebabkan penguasa memakai penyiksaan moral dan fisik seolah-olah segala informasi yang didapat melalui penyiksaan tidak penting untuk diperhatikan (Camara, 2000).

Pengendalian terhadap perlawanan, protes, dan pemberontakan peserta oleh komisi disiplin disertai dengan munculnya berbagai bentuk tindakan kekerasan. Kondisi tersebut dialami langsung oleh para peserta Latihan Kepemimpinan 1 HIMADIKSIO. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut.

“.... Yang verbal dan psikis itu para komdis lebih nakut nakutin dengan bahasa bahasa yang telah mereka rangkai seperti “awas ni kalian engga lulus karena poinnya kurang, awas yaa kalian engga taat aturan” dan dari bahasa bahasa itu kita ke pressure sebagai peserta

dengan aturan aturan yang mengekang kita, jadi kita lebih takut nih bahwa jangan sampe ada satu kesalahan pun....". (Wawancara dengan Bilkis Shifa Husaeni, Peserta LK 1 HIMADIKSIO Periode 2021).

"...pas itu fenomenanya temen aku dibanting sama salah satu komdis pada saat rangkaian menejemen aksi..... Nah dalam aksi itu semua orang kan lagi ngejagain telor nih kan itu di lapangan terbuka aksi nya, kita disiram siram sama panitia, terus ada panitia panitia yang mau nyulik temen kita, disitu kan chaos banget ya, terus tiba tiba di belakang ada salah satu panitia yang pengen nyulik temen aku ehh malah di banting sama salah satu panitia komdis, dan itu menurutku sudah tindakan kekerasan ya dari panitia terhadap peserta". (Wawancara dengan Khansa Nur A, Peserta LK 1 HIMADIKSIO Periode 2023).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, memperlihatkan bahwa upaya pengendalian terhadap perlawanan, protes, dan pemberontakan peserta oleh komisi disiplin dalam kegiatan Latihan Kepemimpinan 1 HIMADIKSIO tidak hanya dilakukan melalui pembatasan ruang argumentasi, tetapi juga disertai dengan praktik kekerasan verbal, psikis, dan fisik. Kekerasan verbal terlihat melalui penggunaan nada suara yang tinggi, pernyataan yang merendahkan, serta ancaman terkait aturan maupun kelulusan, sehingga menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, dan membuat peserta merasa serba salah dalam bertindak. Kekerasan psikis terwujud dalam bentuk intimidasi serta ancaman pengurangan poin, yang semakin memperkuat posisi dominasi komisi disiplin terhadap peserta.

Pada praktik manajemen aksi ditemukan adanya insiden kekerasan fisik, seperti peserta yang dibanting, ditarik hingga terjatuh, terseret, disiram air, bahkan mengalami luka yang memerlukan perawatan di UKS atau pingsan hingga harus dibawa ke klinik. Temuan ini menunjukkan bahwa pola represif yang diterapkan komisi disiplin tidak terbatas pada dimensi simbolik, tetapi juga muncul dalam bentuk kekerasan nyata yang menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik maupun mental peserta.

Sistem kaderisasi dalam Latihan Kepemimpinan 1 HIMADIKSIO memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara komisi disiplin dan peserta, disertai dengan munculnya tindakan represif yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial yang signifikan, baik dalam kehidupan kampus maupun dalam dinamika berorganisasi. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut.

"...Nah jangka pendeknya kita tuh jadi gak suka sama kaka tingkat, gak suka sama organisasi sendiri yaitu HIMADIKSIO, terus kita mikirnya jadi "ah LK 2 LK 3 kayaknya juga begitu deh" jadi jangka pendeknya tuh menganggap jelek semua aktivitas organisasi di kampus...". (Wawancara dengan Haekal Habibi, Peserta LK 1 HIMADIKSIO Periode 2022).

"Dampaknya tuh mereka ngerasa "oh ini ajang gua", jadi kebanyakan mahasiswa mahasiswa yang masuk himadiksio itu ingin menjadi komdis, soalnya merasa bahwa komdis ini keren banget bisa marah marah, aku memantau hal itu karena pas periode berikutnya dan sesi wawancara masuk himpunan aku nanya nanya lah terkait alasan alasan mereka masuk himadiksio, dan banyak dari mereka masuk himadiksio pengen jadi komdis karena mungkin bisa balas dendam kali yak". (Wawancara dengan Fathia Ridhawati, Ketua Pelaksana LK 1 HIMADIKSIO Periode 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Dampak dari kekerasan nomor III ini tidak hanya berhenti pada konteks kegiatan, tetapi juga berlanjut dalam kehidupan kampus. Trauma yang dialami peserta membentuk jarak sosial (gap) antara senior dan junior serta menimbulkan persepsi negatif terhadap organisasi intra kampus. Namun, sebaliknya, bagi sebagian mahasiswa, kekerasan represif yang dijalankan komisi disiplin justru dipandang sebagai simbol prestise dan kekuasaan, sehingga mendorong mereka untuk melestarikan praktik tersebut.

Kekerasan bukanlah jawaban yang sesungguhnya atas kekerasan; bahwa jika kekerasan dihadapi dengan kekerasan, kehidupan akan jatuh dalam spiral kekerasan; bahwa satu satunya jawaban yang benar atas kekerasan adalah keberanian untuk menatap ketidakadilan-ketidakadilan yang diciptakan oleh kekerasan no. 1 (Camara, 2009).

KESIMPULAN

Pada kegiatan Latihan Kepemimpinan I HIMADIKSIO FKIP UNTIRTA, komisi disiplin tidak hanya berperan menjaga ketertiban dan kedisiplinan peserta, tetapi juga menyusun Memorandum of Understanding (MoU) yang memuat aturan serta sanksi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. MoU ini telah menjadi budaya dalam kaderisasi, bahkan memberi hak istimewa bagi komisi disiplin sebagaimana tercantum dalam pasal yang menegaskan bahwa komisi disiplin tidak pernah salah. Kondisi tersebut menempatkan peserta sebagai subjek pasif yang diwajibkan tunduk sepenuhnya pada aturan, sehingga menciptakan relasi kuasa yang timpang. Akibatnya, peserta berada dalam situasi subhuman yang membatasi ekspresi kreativitas dan menimbulkan dampak psikologis berupa rasa takut, ketidaknyamanan, serta keterpaksaan.

Perlawanan, protes, dan pemberontakan peserta dalam kegiatan Latihan Kepemimpinan I HIMADIKSIO muncul sebagai bentuk respons terhadap ketidakadilan aturan, sistem sanksi, serta mekanisme penilaian yang dinilai merugikan. Kesadaran akan posisi mereka sebagai pihak yang terdominasi melahirkan rasa jenuh dan mendorong peserta melakukan protes untuk menuntut kelulusan sekaligus menolak kepatuhan penuh terhadap ketentuan yang berlaku. Puncak dinamika perlawanan terjadi pada saat penyampaian materi manajemen aksi, yang pada awalnya dirancang sebagai ruang pembelajaran, namun kemudian dimanfaatkan peserta sebagai medium untuk menentang panitia, khususnya komisi disiplin, dengan tuntutan agar sistem kaderisasi diselenggarakan secara lebih adil dan manusiawi. Dinamika tersebut bermula dari emosi dan rasa frustrasi individu yang berkembang menjadi kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan.

Pelaksanaan Latihan Kepemimpinan I HIMADIKSIO menunjukkan adanya praktik represif yang diwujudkan melalui upaya pembungkaman terhadap peserta yang menyuarakan protes, pemindahan peserta ke *blackroom* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran, serta penerapan kekerasan verbal, psikis, dan fisik oleh komisi disiplin. Praktik tersebut berdampak pada munculnya trauma psikologis mahasiswa terhadap senior, terbentuknya jarak sosial gap antara junior dan senior, serta berkembangnya citra negatif terhadap organisasi intra kampus. Namun, bagi sebagian mahasiswa, komisi disiplin justru dipersepsikan sebagai simbol prestise dan kekuasaan yang mendorong mereka untuk bergabung dan melestarikan praktik serupa, bahkan menjadikannya sebagai sarana balas dendam terhadap generasi berikutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Camara, H. D. (2000). *Spiral Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset
- Miles, M., & Huberman. (2014). *Huberman: Analisis Data Kualitatif*. Jakarta.
- Oviyanti, F. (2016). Peran Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus Dalam Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Mahasiswa. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 61-79.
- Riyuzen Praja Tuala, S., & Fradito, A. (2021). Strategi Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus Di UIN Raden Intan Lampung. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 237-247.
- Rivai, V. M. (2006). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi edisi 2*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Susan, N. (2022). *Sosiologi Konflik Teori-Teori dan Analisis*, Jakarta: Kencana